



# Ternyata PDAM Tirta Khatulistiwa Tak Pernah Diaudit BPK dan BPKP

## Hanya Diaudit Akuntan Publik Saja

**PONTIANAK-RK.** Begitu mengejutkan, ternyata selama ini apa-apa saja yang dikerjakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam menggunakan APBD Kota Pontianak tidak pernah dilakukan audit investigasi oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) maupun Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Melainkan PDAM Tirta Khatulistiwa hanya menggunakan akuntan publik dalam audit APBD yang dipergunakan.

Ketua Komisi A DPRD Kota Pontianak, Ardiansyah mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan BPK RI Perwakilan Kalbar belum lama ini.

“BPK mengungkapkan kepada kita bahwa PDAM tidak pernah dilakukan audit oleh BPK maupun BPKP, melainkan PDAM mengaudit sendiri dengan menggunakan akuntan publik,” ucap Ardiansyah.

Mengapa demikian, menurut Ardiansyah, BPK dan BPKP merasa kekurangan

gan tenaga atau pekerja di dalam melakukan audit investigasi dalam penggunaan APBD yang dilakukan PDAM Tirta Khatulistiwa. “Harusnya BPK dan BPKP menyampaikan ini sejak lama kepada kami. Supaya kami dapat menyampaikan kepada BPK dan BPKP pusat agar ditambah tenaga untuk di Kota Pontianak. Karena bagaimana pun audit sangat penting dilakukan terhadap suatu SKPD maupun BUMD yang menggunakan APBD dalam pelaksanaan kerjanya,” jelasnya.

Dengan PDAM Tirta Khatulistiwa melakukan audit sendiri dalam penggunaan ABPD Kota Pontianak selama ini, Ardiansyah menambahkan, kinerja PDAM patut dipertanyakan. Terutama di dalam penggunaan APBD Kota Pontianak.

“Penggunaan anggaran daerah yang dipergunakan oleh PDAM dalamkinerja perlu diketahui oleh masyarakat untuk apa saja, bagaimana pelak-

ganannya serta sudah benar atau belum pelaksanaannya. Namun sayangnya, bukan BPK dan BPKP yang melakukan audit, melainkan PDAM menggunakan akuntan publik yang ditunjuk mereka sendiri untuk melakukan audit,” bebernya.

“Kan ini tidak independen dalam pengawasan anggaran daerah yang dipergunakan oleh PDAM,” timpalnya.

Menurutnya, perlu diketahui bahwa DPRD Kota Pontianak sudah membuat dua Perda penambahan modal PDAM, di mana dalam Perda itu kinerja PDAM juga menggunakan anggaran daerah. “Kita sudah membuat dua Perda penambahan modal PDAM. Maka kembali tegaskan, kita minta BPK atau pun BPKP yang melakukan audit, bukan akuntan publik. Kemudian kita juga tidak ingin PDAM menggunakan akuntan publik untuk diaudit, karena independennya diragukan,” lugasnya.

**REPORTER: AHMAD MUNDZIRIN  
REDAKTUR: ANDRI**

A DPRD Kota Pontianak lainnya men-

gaku, sangat tidak setuju terhadap audit APBD di PDAM yang hanya menggunakan akuntan publik, apalagi yang ditunjuk sendiri oleh PDAM.

“SKPD maupun BUMD, dalam hal ini PDAM, tidak boleh penggunaan anggaran daerah diaudit oleh akuntan publik saja, melainkan harus diaudit oleh lembaga yang sudah ditunjuk pemerintah. Yakkni, BPK dan BPK, karena sangat bahaya jika dibiarkan,” ucap Ardiansyah yang merasa khawatir ada penyimpangan dalam penggunaan APBD yang dilakukan oleh PDAM Kota Pontianak.

Legislator PAN itu menegaskan, “Jadi kita kembali tegaskan, kita minta BPK atau pun BPKP yang melakukan audit, bukan akuntan publik. Kemudian kita juga tidak ingin PDAM menggunakan akuntan publik untuk diaudit, karena independennya diragukan,” lugasnya.